

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Mengenai Wilayah Kajian

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Pasaman

Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0⁰55' Lintang Utara sampai dengan 0⁰6' Lintang Selatan dan 99⁰45' Bujur Timur sampai dengan 100⁰21' Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.240 meter di atas permukaan laut. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung, seperti Gunung Ambun di Bonjol, Gunung Sigapuak dan Kulabu di Dua Koto, Malengang di Rao, dan Gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini terletak di Kecamatan Lubuk Sikaping.

Pasaman terletak di bagian utara dari provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara di bagian utara dan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam, di barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan di timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 Km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari.12 kecamatan kabupaten Pasaman :

1. Kecamatan Duo Koto
2. Kecamatan Tigo Nagari
3. Kecamatan Bonjol
4. Kecamatan Lubuk Sikaping
5. Kecamatan Mapat Tunggul
6. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
7. Kecamatan Panti
8. Kecamatan Rao
9. Kecamatan Rao Selatan
10. Kecamatan Rao Utara
11. Kecamatan Simpang Alahan Mati
12. Kecamatan Padang Gelugur

2. Kemiringan

Di Kabupaten Pasaman, bentuk bentang alamnya cukup beragam. Jenis kemiringan yang paling dominan membentuk bentang alam ialah kemiringan lebih dari 40%, yaitu terbentang seluas 267.650,85 Ha atau

mencapai 67,80% dari luas kabupaten. Lereng sangat terjal tersebut berada di Kecamatan Rao Utara, Rao, Rao Selatan, Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan. Selanjutnya Lereng Datar (0-8%) seluas 61.105 Ha atau 15,48% berada di Kecamatan Tigo Nagari, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Padang Gelugur, sebagian kecil Rao Selatan dan Kecamatan Dua Koto. Adapun tingkat kelerengan lainnya yang juga masih dapat diperkenankan untuk kegiatan budidaya adalah; 8–15% dan 15–25% relatif tidak terlalu luas, yaitu masing-masing 3,03% dan 4,88% dari luas wilayah.

3. Iklim

Rata-rata curah hujan di Kab.Pasaman pada tahun 2007 menurun dibandingkan tahun 2006. Pada tabel 1.10 tercatat bahwa rata-rata curah hujan tahun 2007 adalah 140,39 mm/bulan sedangkan pada tahun sebelumnya 276,42 mm/bulan.

Rata-rata hari hujan sepanjang tahun 2007 menurut catatan beberapa stasiun yang ada di sejumlah wilayah kecamatan tercatat rata-rata 5,97 hari per bulannya dan jika dilihat bulan-bulan yang frekuensi hari hujan terbanyak adalah pada bulan April dan Desember 2007 yakni berkisar antara 8-12 hari.

4. Jenis Tanah

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasaman adalah jenis Litosol dari bahan Alluvial batuan beku pegunungan Vulkanik, Podsolik

Merah Kuning, Latosol dan Litosol dari batuan beku endapan metamorf pada pegunungan patahan rendah, dan Podzolik Coklat dari bahan Alluvial pada pegunungan patahan yang tinggi. Jenis tanah yang relatif luas di Kabupaten Pasaman adalah jenis Litosol dan Jenis Podzolik Merah Kuning, yaitu masing-masing 106.619 Ha atau 27,01% dan 103.988 atau 26,34% dari luas wilayah

Tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Pasaman pada umumnya didominasi oleh tekstur halus, yang tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan klasifikasi tekstur lainnya hanya sebagian kecil, umumnya terdapat di Kecamatan Rao, Mapat Tunggul dan Kecamatan Panti

5. Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Pasaman banyaknya terdapat sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil, yang tersebar di setiap kecamatan. Beberapa sungai besar yang penting adalah Batang Sumpur, Batang Masang, Batang Pasaman, Batang Sontang, Batang Asik, Batang Bindalik, Batang Alahan Panjang, Batang Tibawan, dan Batang Kampar. Kecamatan Tigo Nagari merupakan kecamatan yang paling banyak sungainya (51 sungai) dan diikuti oleh Kecamatan Bonjol (29 sungai). Sungai-sungai yang terdapat di Kecamatan Mapat Tunggul merupakan daerah hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota.

2.1.2 Demografi atau Kependudukan

Kependudukan merupakan faktor yang sangat penting bagi Pembangunan di suatu wilayah. Namun, keberhasilan mengendalikan dan mengatur Penduduk akan berdampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Berkaitan dengan arus migrasi yang memadati kota-kota besar, maka perlu upaya menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan, tujuannya diharapkan dapat menekan laju urbanisasi. Kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman menurut proyeksi pada tahun 2015. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman adalah 269.883 jiwa, dengan luas wilayah 3.947,63 Km². Secara rinci mengenai Jumlah Penduduk di seluruh kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Pasaman Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Per Km ²
1	Bonjol	25 532	6 383	131
2	Tigo Nagari	23 386	7 795	66
3	Simpang Alahan Mati	9 866	4 933	142
4	Lubuk Sikaping	45 726	7 621	132
5	Dua Koto	28 583	14 292	79
6	Panti	34 014	34 014	160
7	Padang Gelugur	21 961	21 961	137
8	Rao	23 458	11 729	99
9	Mapat Tunggul	8 579	2 860	14
10	Mapat Tunggul	7 203	3 602	15

	Selatan			
1 1	Rao Selatan	24 056	8 019	71
1 2	Rao Utara	10 312	3 437	17
	Jumlah	269.883	8.243	67

Sumber : Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2010

2.1.3 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan menurut jenis penggunaannya di Kabupaten Pasaman didominasi oleh hutan dengan luas wilayah 190,433,00 ha atau 48,24 % dari jumlah luas kawasan di Kabupaten Pasaman. Sedangkan penggunaan lahanterkecil menurut jenis penggunaannya berada pada kawasan industri yakni 30,70 ha atau 0,01 % dari luas lahan keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan menurut jenis penggunaannya di Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya

	Kemiringan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
	Perkampungan / <i>Villages</i>	7 206,7 3	1, 8 3
	Kawasan Industri / <i>Industries Area</i>	30,70	0, 0 1
	Sawah / <i>Wet Land</i>	26 532,3 8	6, 7 2
	a. Irigasi / <i>Irrigation</i>		
	b. Tadah Hujan / <i>Wet rain</i>	16 472,0 0	4, 1 7
		10 060,3 8	2, 5 5
	Tegalan/Ladang / <i>Dry</i> <i>Field/Shifting</i>	8 211,0 0	2, 0 8

	Kemiringan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
	Kebun Campuran / <i>Mix garden</i>	6 911,7 9	1, 7 5
	Perkebunan Rakyat / <i>Smallholder Estate</i>	26 102,0 0	6, 6 1
	Perkebunan Besar / <i>Estate</i>	212,0 0	0, 0 5
	Hutan / <i>Jungle</i>	190 433,0 0	4 8, 2 4
	Tanah Belukar / <i>Bushes Forest</i>	37 315,0 0	9, 4 5
	Tanah Rusak / <i>Damage land</i>	7 992,0 0	2, 0 2
	Perairan / <i>waters</i>	5	1,

	Kemiringan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
		893,0 0	4 9
	Padang Rumput / <i>Weeds field</i>	75 277,0 0	1 9, 0 7
	Hutan Sejenis / <i>Filed Meadows</i>	894,4 0	0, 2 3
	Lain-lain / <i>Others</i>	1 752,0 0	0, 4 4
	Jumlah	394 763,0 0	1 0 0, 0 0
<i>Sumber : Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2010</i>			

2.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

2.2.1 Letak Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman terletak di pusat Pemerintahan Kabupaten Pasaman atau lebih tepatnya di Ibu kota Kabupaten Pasaman yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman no.54 Pauh, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman untuk sementara ini tidak ada yang memimpin dan hanya ada Pelaksana Tugas (PLT), yang melaksanakan PLT adalah bapak Markarios SH. MKn. Selain itu beliau merupakan Kepala di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat.

2.2.2 Visi-misi, dan Strategi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

VISI:

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

MISI:

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

STRATEGI :

1. Legalisasi asset

Legalisasi asset dilakukan dengan penerbitan sertipikat atau memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Legalisasi asset tanah akan memberikan jaminan hukum dan jaminan rasa aman atas penguasaan dan pemilikan tanah bagi masyarakat.

2. Reforma Agraria (Akses Reform/Landreform plus)

Dengan adanya reform agraria memberikan peluang kepada rakyat untuk memiliki tanah dan akses tanah tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa diperlukan untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antar masyarakat maupun rakyat dengan pemerintah dengan menangani secara win-win solution

2. Penertiban Tanah Terlantar

Mencegah terjadinya tanah yang tidak dimanfaatkan/diusahakan oleh pemiliknya yang pada akhirnya tanah tersebut tidak bisa digunakan rakyat

3. Larasita

Pengembangan akses masyarakat pada penguasaan dan pelayanan melalui Kantor Pertanahan bergerak.

2.2.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsure kunci dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan, sesuai tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan kabupaten merupakan ujung tombak di daerah yang melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelayanan bidang pertanahan, kompetensi dan kinerja para pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Pada hakekatnya semua komponen dalam organisasi mempunyai peranan yang sama pentingnya untuk mensinergikan kerja institusi. Berjalannya suatu organisasi dengan baik diibaratkan sebuah orchestra yang memerlukan keharmonisan irama kerja semua komponen agar diperoleh pencapaian standar kinerja pelayanan publik yang optimal.

Jumlah pegawai di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Pasaman sebanyak 16 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 3 perempuan. Tabel 2.3 berikut akan menjelaskan tentang profil sumber daya manusia kantor pertanahan kabupaten pasaman menurut golongan dan ruang.

Tabel 2.3

**Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Menurut
Golongan Dan Jenis Kelamin**

DAFTAR PEGAWAI						
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN						
No	NAMA	NIP		Gol	JABATAN	LK/PR
1	JUNAI, SH.M. Hum	19620617 199103 1 002	Pembina Tk I	IV/b	Kepala Kantor	LK
2	RISDIANTO,SH	19590919 198203 1 002	Penata Tk I	III/d	Kasubag Tata Usaha	LK
3	DAHRIWAL, A. Ptnh	19620917 198603 1 004	Penata Tk I	III/d	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	LK
4	HARMEN SYAFEI, SH	19700204 199103 1 004	Penata Tk I	III/d	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	LK
5	ERRIZAL,SH	19760824 199803 1 006	Penata Tk I	III/d	Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	LK
6	CANDRA SUDARSO,SH	19680914 199003 1 004	Penata	III/c	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	LK
7	ZULFITRIA NURYANTI, SP	19800509 200804 2 003	Penata	III/c	Kepala Urusan Keuangan dan BMN	PR
8	SYAFRION	19620706 198603 1 001	Penata Muda Tk I	III/b	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	LK
9	MARYETTI	19600601 198301 2 001	Penata Muda Tk I	III/b	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	PR
10	RULZAMI AZDI, SH	19791006 200604 1 003	Penata Muda	III/ a	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral	LK
11	SYAFRIAL	19591211 198003 1 004	Pengatur Tk I	II/d	Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT	LK
12	LIDIYA	19870927 200604 2 001	Pengatur	II/c	Bendahara	PR
13	ANDRI SATRIA PRATAMA	19870224 200604 1 002	Pengatur	II/c	Petugas ukur	LK
14	AHMAD ELTARI HARIJON	19760125 201408 1 002	Pengatur Muda	II/a	Pengelola Pegawai	LK
15	RIKHY SYAMSIR	19810511 201408 1 001	Pengatur Muda	II/a	Petugas ukur	LK
16	AGA RISVIANDI NST, AP	19901005 201503 1 002	Pengatur Muda	II/a	Bendahara	LK

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

2.2.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

1. Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan ;
- b) Pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan;
- c) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah ;
- d) Pelaksanaan penggunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu ;
- e) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah ;
- f) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah iritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- g) Penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan ;
- h) Pengkoordinasian pemangku kepentingan penggunaan tanah ;

- i) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) ;
 - j) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan Kepada masyarakat, pemerintah dan swasta ;
 - k) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan ;
 - l) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan ;
 - m) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
3. Susunan organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten pasaman
- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten pasaman
 - b. SubBagian Tata Usaha
 - c. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
 - d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
 - e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat
 - f. Seksi Sengketa, konflik dan perkara

2.2.5 Tata Kerja

Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional. Baik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 56 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 dimana disebutkan bahwa Di dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, semua unsur baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintahan di daerah.

- a. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang;
- b. Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

Setiap pemimpin suatu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

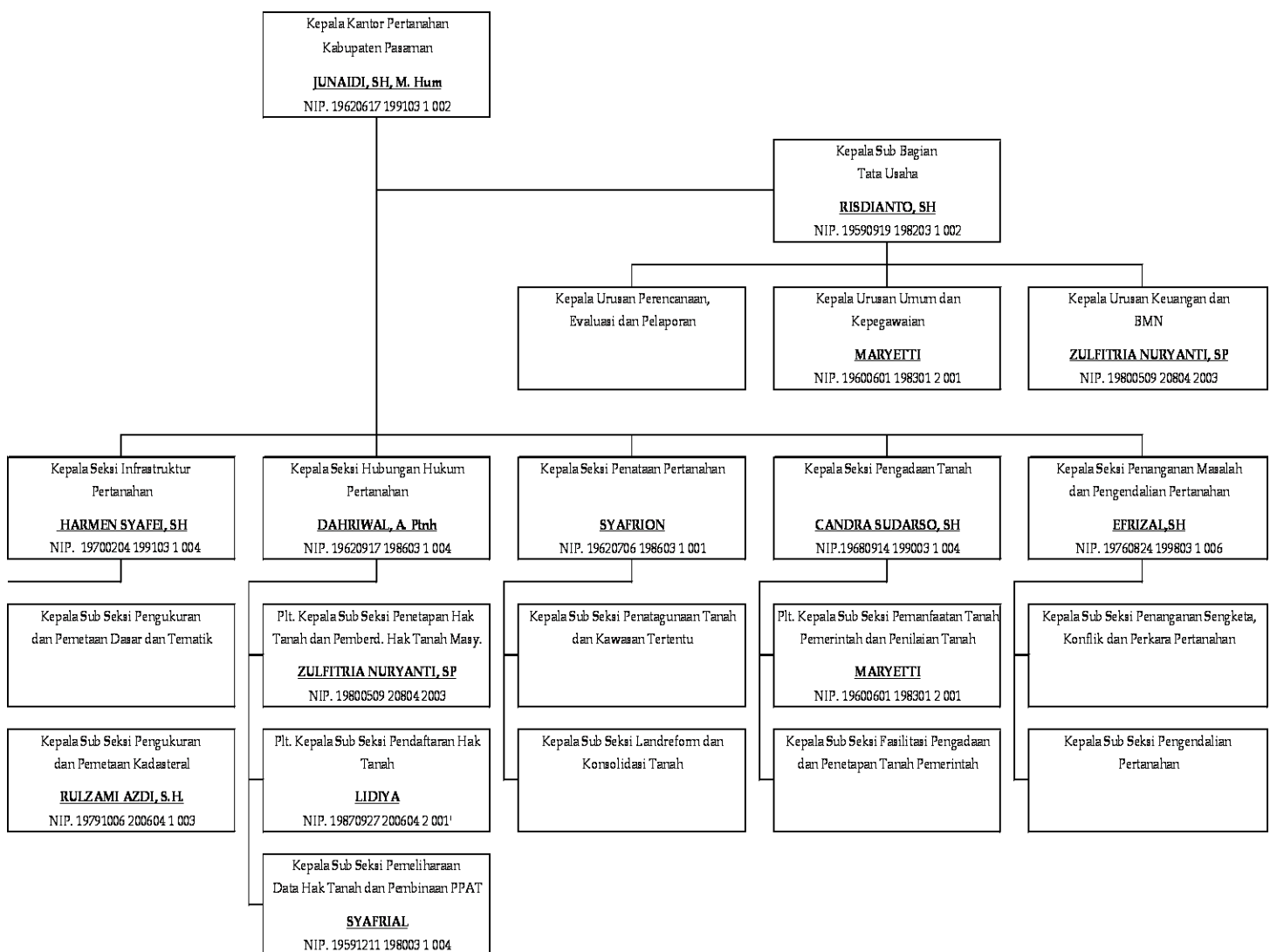
2.2.6 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman

Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman adalah Instansi Vertical Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta melalui Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, yang menangani urusan di bidang pertanahan sebagaimana Keppres Nomor 10 Tahun 2001 pengganti Keppres Nomor 154 Tahun 1999 pengganti Keppres 26 tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pada tahun 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang intinya memuat kedudukan, Tugas dan Fungsinya dalam melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Pertanahan secara Nasional, Regional dan Sektoral yang mengatur struktur Badan Pertanahan Nasional mulai dari tingkat pusat sampai dengan propinsi dan kabupaten/kota.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman



Sumber Data : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasaman Tahun 2016

2.3 Deskripsi Mengenai Keadaan Wilayah Studi Kasus

2.3.1 Letak Geografis Kecamatan Rao Selatan

Rao Selatan merupakan kawasan perbukitan yang mempunyai suhu rata-rata 20°C-26°C. Letak Geografis kecamatan Rao Selatan adalah 99°58'-100°08' BT, 00°37'-00°28' LU, dengan luas daerah 338,98 km.

Kecamatan Rao Selatan memiliki 3 desa antara lain :

1. Lansat Kadap
2. Lubuk Layang
3. Tanjung Betung

Dalam Tugas Akhir ini Penulis memilih Desa Lansat Kadap Kecamatan Rao Selatan sebagai studi kasus dalam proses Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Pelaksanaan PRONA 2017.

Secara Administrasi Desa lansat kadap termasuk dalam wilayah kecamatan rao selatan, dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan rao utara
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan
Pd.gelugur
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan kecamatan Rao

4. Sebelah Timur Berbatasan dengan kecamatan Mapat
Tunggul

2.3.2 Topografi dan jenis tanah

Desa Lansat Kadap memiliki topografi miring 40 % dengan ketinggian tempat antara 252-100 meter di atas permukaan laut. Sebagian tanahnya berjenis litosol dan jenis podzolik merah kuning.

2.3.3 Keadaan Iklim

Desa Lansat Kadap mempunyai suhu rata-rata harian 24°C, kelembapan rata-rata hari 80%, sehingga desa lansat kadap tergolong daerah sedang, sangat baik untuk pertumbuhan tanaman dan kelangsungan hidup hewan ternak. Curah hujan rata-rata adalah berkisar dari 132-400 mm dengan penyebaran yang tidak merata sepanjang tahun.

2.3.4 Demografi atau Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Lansat Kadap tahun 2016 adalah 7252 jiwa terdiri dari Penduduk laki-laki sebanyak 3545 jiwa dan perempuan sebanyak 3707 jiwa yang tersebar di desa lansat kadap.